

**DOKUMEN
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
UKL-UPL**

**RENCANA PEMBANGUNAN
PUSKESMAS AIRPURA**

**KAMPUNG AIR MATI
NAGARI MUARA INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

2016



PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. ROHANA KUDUS Telp. (0756) 21509
PAINAN

Nomor : 660/34/TL-PHL/BLH-PS/X/2016

Lampiran : -

Perihal :

**Rekomendasi Atas Persetujuan Dok. UKL-UPL
Rencana Kegiatan Pembangunan Puskesmas
Airpura oleh Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan
di Kampung Air Mati Nagari Muara Inderapura
Kecamatan Airpura Kab. Pesisir Selatan**

Painan, 11 Oktober 2016

Kepada Yth.

Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Pesisir Selatan

di-

Painan

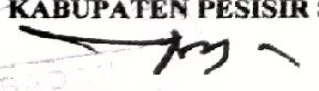
Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/08/PL-P2B/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016, perihal Permohonan Pembahasan Dokumen UKL-UPL dan Izin Lingkungan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk Rencana Kegiatan Pembangunan Puskesmas Airpura oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Kampung Air Mati Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan. Bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan pada hari Kamis tanggal 8 September 2016, maka terhadap Dokumen UKL-UPL Rencana Kegiatan Pembangunan Puskesmas Airpura oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Kampung Air Mati Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas bangunan sebesar $\pm 1.879 \text{ m}^2$ dan luas lahan sebesar $\pm 10.000 \text{ m}^2$ secara teknis dapat disetujui, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dokumen UKL-UPL yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggungjawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun Dokumen UKL-UPL baru, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Penanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaksud dalam Dokumen UKL-UPL dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari Rencana Kegiatan Pembangunan Puskesmas Airpura oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Kampung Air Mati Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas bangunan sebesar $\pm 1.879 \text{ m}^2$ dan luas lahan sebesar $\pm 10.000 \text{ m}^2$.
- 4) Penanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan wajib melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam Dokumen UKL-UPL tersebut kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dan instansi-instansi sektor terkait (termasuk instansi pemberi izin) setiap 6 bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.
- 5) Rekomendasi ini bukan merupakan izin, namun merupakan persyaratan untuk mengurus izin lingkungan.

Selanjutnya Bupati Pesisir Selatan, Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kepala Satuan Kerja Pemerintahan Daerah lainnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan, penanggung jawab wajib melakukan ketentuan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara dalam menindaklanjuti implementasi dokumen dimaksud terima kasih.

**KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN**


Drs. KHAIRUL EFENDI
Nip. 19601105 198203 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan Sebagai Laporan di Painan
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jln.H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 22687

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 570/23/IL/BPMP2T-PS/X/2016

T E N T A N G

IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS AIRPURA
OLEH DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG BERLOKASI DI
KAMPUNG AIR MATI NAGARI MUARA INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN

- Membaca** :
1. Surat Permohonan Kepala DINAS KESEHATAN Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/08/PL-P2B/VIII/2016 Tanggal 11 Oktober 2016 tentang Permohonan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Puskesmas Airpura Oleh DINAS KESEHATAN Kabupaten Pesisir Selatan yang berlokasi di Kampung Air Mati Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.
 2. Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 660/34/TL-PHL/BLH-PS/IX/2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Rekomendasi Rencana Kegiatan Pembangunan Puskesmas Airpura Oleh DINAS KESEHATAN Kabupaten Pesisir Selatan Yang berlokasi di Kampung Air Mati Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas lahan sebesar $\pm 10.000 \text{ M}^2$ dan luas bangunan sebesar $\pm 1.879 \text{ M}^2$
- Menimbang** :
- a. Bahwa Rencana Kegiatan Pembangunan Puskesmas Airpura oleh DINAS KESEHATAN Kabupaten Pesisir Selatan yang berlokasi di Kampung Air Mati Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Kegiatan yang wajib memiliki Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL)
 - b. Bahwa dalam rangka pengendalian dampak terhadap lingkungan akibat dari Rencana kegiatan pembangunan Puskesmas Airpura oleh DINAS KESEHATAN Kabupaten pesisir Selatan yang berlokasi di Kampung Air Mati Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sebagai salah satu bagian dari study Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL)
 - c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan Huruf b, perlu memberikan Izin Lingkungan terhadap Kegiatan Rencana Pembangunan Puskesmas Airpura yang berlokasi di Kampung Air Mati Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dan menetapkannya dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis Undang - Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957). Undang- Undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
 3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

4. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja;
5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
7. Unadang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang – Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 tahun 1990 tentang Kualitas Air Bersih;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :147/Menkes/Per/I/2000 Tentang Perizinan Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Nomor 5285);
14. Peraturan Menteri Negara Lingkunagn Hidup Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan UKL/UPL;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang jenis rencana Usaha Dan Atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01 Tahun 1980 Tentang K3 Pada Kontruksi Bangunan;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan ;
20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor :KEP-48/MENLH/XI/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 tahun 2005 tentang Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan (SITU/HO) dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Izin Gangguan);
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 570/ 355/ KPTS/ BPT – PS/ 2015 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 tahun 2015 tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Puskesmas Airpura Oleh DINAS KESEHATAN Kabupaten Pesisir Selatan Kepada :
- Nama Perusahaan/Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
- Jenis Usaha dan / Kegiatan : Pembangunan Puskesmas Airpura
- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
- Alamat Kantor : Jalan H. Agus Salim Paiman
- Telp/fax : (0756) 21218
- Lokasi Kegiatan : Kampung Air Mati Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan
- Luas Lahan : $\pm 10\,000\text{ M}^2$
- Luas Bangunan : $\pm 1.879\text{ M}^2$

KEDUA

- : Ruang Lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan ini meliputi :
1. Pembuatan Jalan
 2. Saluran Drainase
 3. Pekerjaan Mechanical dan Electrical
 4. Pekerjaan Utilitas
 5. Pembersihan dan Pematangan Lahan
 6. Pembangunan Fisik Bangunan
 7. Pekerjaan Struktur
 8. Mobilitas Bahan dan Material
 9. Pembebasan Lahan
 10. Blocking Area
 11. Rekrutmen Tenaga Kerja untuk Tahap Kontruksi
 12. Septick Tank
 13. Penyediaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS)
 14. Rekrutmen Tenaga Kerja untuk Tahap Operasi
 15. Perawatan dan Pemeliharaan Bangunan.

KETIGA

- : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan kegiatan wajib memiliki Izin PPLH seperti :
1. Memiliki Izin Penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B 3)
 2. Memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair Ke badan Air (IPLC)
 3. Mengurus Izin usaha dan/atau izin lain yang terkait dengan kegiatannya ;

KEEMPAT

- : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan diwajibkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dokumen Final Amdal setiap 6 (enam) bulan sekali sejak ditetapkan Keputusan ini Kepada Gubernur Propinsi Sumatera Barat up. Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat dan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan up Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan .

- KELIMA** : Masa berlaku izin lingkungan ini sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan / atau kegiatan.
- KEENAM** : Penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan atau kegiatannya sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan usaha dan / atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola pemrakarsa wajib melaporkan kepada instansi terkait.
- KEDELAPAN** : Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Pesisir Selatan ini, dan permohonan perpanjangan izin di ajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan

Pada Tanggal : 18 Oktober 2016

**A.n BUPATI PESISIR SELATAN
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ibu menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Bapak Kepala Bapedalda Provinsi Sumatera Barat di Padang
5. Sdr. Ka. Badan Lingkungan hidup Kabupaten Pesisir Selatan di Painan .
6. Sdr .Camat Airpura
7. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 570/ 23 /IL/BPMP2T-PS/X/2016
TANGGAL : 18 OKTOBER 2016
TENTANG : IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN PUSKESMAS AIRPURA OLEH
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
YANG BERLOKASI DI KAMPUNG AIR MATI
NAGARI MUARA INDERAPURA KECAMATAN
AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN.

PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN
PUSKESMAS AIRPURA YANG BERLOKASI DI KAMPUNG AIR MATI NAGARI MUARA
INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN.

A. PENDEKATAN TEKNOLOGI :

1. Penurunan kualitas udara dan kebisingan harus dikelola dengan baik disekitar lokasi Puskesmas dengan menanam pohon pelindung di sekitar lokasi ;
2. Kegiatan pengujian pondasi sangat penting dilaksanakan untuk mengetahui ketahanan suatu bangunan terhadap goncang-goncang dan gempa serta angin puyuh atau puting beliung, kekuatan beton harus memenuhi standar yang telah ditentukan apabila terjadi kekurangan / dibawah standar harus ditambah hal ini perlu dilakukan pengawasan terhadap kekuatan bangunan;
3. Tetap mempertahankan ekosistem disekitar Puskesmas yang akan dibangun;
4. Melibatkan masyarakat dalam proses pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi.

B. PENDEKATAN SOSIAL EKONOMI

1. Melaksanakan sosialisasi rencana kegiatan sebelum pelaksanaan proyek kepada tokoh masyarakat dan aparat disekitar rencana kegiatan
2. Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat (community development) setelah melalui suatu kajian mendalam dan komprehensif berdasarkan kerangka kepedulian sosial kemasyarakatan.

C. PENDEKATAN INSTITUSI

1. Jaminan dari pemrakarsa bahwa pelaksanaan kegiatan akan dilakukan dengan mengikuti peraturan-peraturan dibidang lingkungan hidup, baik yang bersifat lokal, regional, nasional maupun internasional.
2. Ikut berperan serta bersama aparat setempat dalam melakukan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, terutama yang berada disekitar kegiatan.
3. Mengadakan kerjasama dengan instansi terkait untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Membuat laporan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala kepada pihak – pihak yang berkepentingan.

A.n BUPATI PESISIR SELATAN
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN PESISIR SELATAN



NOMOR : 570/23 / IL/BPMP/2T-PS/X/2016

TANGGAL : 18 Oktober 2016

TENTANG : IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS AIRPURA OLEH DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG BERLOKASI DI KAMPUNG AIR MATI NAGARI MUARA INDERAPURA KECAMATAN AIR PURA KABUPATEN PESISIR SELATAN.

No	Dampak Lingkungan Yang Harus Dikelola	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Ket
					Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup		
A. TAHAP PRA KONSTRUKSI												
1.	Kesempatan Kerja	Sumber dampak berasal dari rekrutmen tenaga kerja untuk tahap konstruksi	Dampak penting yang akan terjadi adalah muncul persepsi positif masyarakat terhadap kegiatan rekrutmen tenaga kerja untuk tahap konstruksi	Besaran dampak tergolong kecil dan positif, karena jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan hanya 33 orang.	1) Mengupayakan rekrutmen tenaga kerja dengan memprioritaskan tenaga kerja berasal dari masyarakat sekitar atau lokal sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. 2) Membayarkan upah kepada tenaga kerja berdasarkan UMR Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan kualifikasi tenaga	Lokasi pengelolaan difokuskan pada daerah dimana kegiatan pembangunan Puskesmas Airpura berlangsung	Pengelolaan dilakukan selama tahap konstruksi berlangsung	Melakukan observasi lapangan dan melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar dan tenaga kerja yang terlibat dalam tahap konstruksi	Pelaksanaan pemantauan dilakukan pada daerah di lokasi tapak kegiatan	Pemantauan dilakukan satu kali selama tahap konstruksi	a. Pei aksana Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selaku pemrakarsa. b. Pen gawas 1) Badan lingkungan	

									Kabupaten Pesisir Selatan
									2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
									Kabupaten Pesisir Selatan
									3) Camat Airapura
									4) Wali Nagari Muara Inderapura
								c.	Pelaporan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan

Persepsi Masyarakat	dampak berasal dari: a. Pengadaan lahan b. Rekrutmen tenaga kerja untuk tahap konstruksi	penting yang akan terjadi adalah muncul persepsi positif dan masyarakat terhadap kegiatan pengadaan lahan dan rekrutmen tenaga kerja untuk tahap konstruksi	dampak tergolong kecil dan positif, karena masyarakat di sekitar lokasi tapak kegiatan sangat mendukung rencana kegiatan pembangunan Puskesmas Airpura.	penggantian Hak Milik pada sertifikat tanah menjadi Hak Guna Bangunan dengan luas 10.000 m2, sebagaimana yang telah ditentukan oleh pemilik lahan 2) Adanya surat keterangan hibah, bahwa pemilik tanah telah menghibahkan lahan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bukan kepada perorangan. 3) Melakukan sosialisasi rencana pembangunan Puskesmas kepada masyarakat di lokasi kegiatan. 4) Mengupayakan rekrutmen tenaga kerja dengan memprioritaskan tenaga kerja berasal dari masyarakat sekitar tapak kegiatan atau lokal sesuai dengan klasifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan.	pengelolaan difokuskan pada daerah rencana kegiatan pembangunan Puskesmas Airpura berlangsung	dilakukan selama tahap prakonstruksi berlangsung terutama pada saat rekrutmen tenaga kerja untuk tahap konstruksi	observasi lapangan dan melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar dan tenaga kerja yang terlibat pada tahap konstruksi	pemantauan dilakukan di sekitar lokasi tapak kegiatan dan masyarakat yang ada di sekitar lokasi tapak kegiatan	dilakukan satu kali selama tahap konstruksi	Per aksana Dinas Kesehata n Kabupate n Pesisir Selatan selaku pemrakar sa. b. Pen gawas 1) Badan Lingkunga n Hidup Kabupate n Pesisir Selatan 2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigr asi Kabupate n Pesisir Selatan 3) Camat Airpura 4) Wali Nagari Muara Inderapur a c.
---------------------	--	---	---	--	---	---	---	--	---	---

					kepada tenaga kerja berdasarkan UMR Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja.						aporan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
B TAHAP KONSTRUKSI											
1.	Kualitas Udara dan Kebisingan	Sumber dampak berasal dari : a) Mobilisasi peralatan dan material b) Pembangunan gedung puskesmas	Dampak yang ditimbulkan yaitu meningkatnya kandungan parameter debu (TSP), gas (SO ₂ , NO ₂ , CO) dan peningkatan Kebisingan	Besaran dampak yang ditimbulkan adalah sangat kecil dan bersifat negatif karena kegiatan konstruksi hanya sementara.	1) Menutup dengan terpal bak kendaraan pada saat pengangkutan peralatan dan material bangunan yang dibutuhkan 2) Mematikan mesin kendaraan pada saat pembongkaran peralatan dan material bangunan 3) Menyimpan/meletakkan peralatan dan material bangunan untuk kegiatan konstruksi yang menimbulkan debu dengan keadaan tertutup. 4) Untuk mengatasi tingkat kebisingan sesaat yang berasal	Lokasi pengelolaan difokuskan pada daerah dimana kegiatan pembangunan Puskesmas Airpura berlangsung	Pengelolaan dilakukan selama tahap konstruksi berlangsung	Melakukan observasi lapangan dan melakukan wawancara dengan tenaga kerja yang terlibat dalam tahap konstruksi	Pelaksanaan pemantauan dilakukan pada daerah dimana kegiatan pembangunan Puskesmas Airpura berlangsung	Pemantauan dilakukan 1 (satu) x 6 (enam) bulan selama tahap konstruksi	a. Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selaku pemrakarsa. b. Pengawas 1) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan 2) Dinas Kesehatan Kabupaten

					dari kegiatan mobilisasi, maka harus dipastikan setiap kendaraan pengangkut material berada dalam kondisi layak pakai.						n Pesisir Selatan c. Pelaporan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
2.	Penurunan Kualitas Air Permukaan	Sumber dampak berasal dari pembangunan gedung puskesmas	Terjadinya penurunan kualitas air permukaan yang ditunjukkan dengan peningkatan nilai beberapa parameter kualitas air permukaan yang melebihi baku mutu	Besaran dampak yang ditimbulkan adalah sangat kecil dan bersifat negatif karena kegiatan konstruksi hanya sementara.	1) Pembuatan drainase yang dilengkapi dengan perangkap sedimen yang mengalirkan air hujan langsung ke badan air (drainase). 2) Melokalisasi sisa-sisa material kegiatan konstruksi sehingga tidak terbawa ke dalam drainase pada saat hujan. 3) Melakukan pembersihan secara rutin sisa-sisa material yang berada dalam drainase dan perangkap sedimen.	Pengelolaan dilakukan di lokasi tapak kegiatan	Pengelolaan dilakukan selama kegiatan konstruksi	Pengambilan sampel air permukaan sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah dengan parameter BOD-S, TSS, Minyak dan Lemak, serta pH	Pemantauan dilakukan di lokasi tapak kegiatan	Pemantauan dilakukan 1 (satu) x 6 (enam) bulan selama tahap konstruksi	a. Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selaku pemrakarsa. b. Pengawas 1) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan 2) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

											c. Pelaporan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
3.	Kesempatan Kerja	Sumber dampak berasal dari rekrutmen tenaga kerja untuk tahap operasi	Dampak penting yang akan terjadi adalah muncul persepsi positif masyarakat terhadap kegiatan rekrutmen tenaga kerja untuk tahap operasional Puskesmas Airpura	Sasaran dampak yang ditimbulkan adalah sangat kecil dan bersifat positif karena dapat mengurangi tingkat pengangguran khususnya di Kecamatan Airpura, pada umumnya di Kabupaten Pesisir Selatan.	1) Mengupayakan rekrutmen tenaga kerja dengan memprioritaskan tenaga kerja berasal dari masyarakat sekitar atau lokal sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. 2) Membayarkan upah kepada tenaga kerja berdasarkan UMR Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja.	Lokasi pengelolaan difokuskan pada daerah dimana kegiatan pembangunan Puskesmas Airpura berlangsung	Pengelolaan dilakukan selama tahap konstruksi berlangsung	Melakukan observasi lapangan dan melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar dan tenaga kerja yang terlibat dalam tahap konstruksi	Pelaksanaan pemantauan dilakukan pada daerah tapak kegiatan	Pemantauan dilakukan 1 (satu) x 6 (enam) bulan selama tahap konstruksi	a. Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selaku pemrakarsa. b. Pengawas 1) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan 2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir

											Selatan 3) Camat Airpura 4) Wali Nagari Muara Inderapur a c. Pel aporan Badan Lingkung an Hidup Kabupate n Pesisir Selatan
4.	Kesempatan Berusaha	Sumber dampak berasal dari pembangunan gedung puskesmas	Jenis dampak yang ditimbulkan yaitu munculnya kesempatan berusaha bagi masyarakat di sekitar lokasi tapak kegiatan yang berprofesi sebagai pedagang	Besaran dampak yang ditimbulkan adalah sangat kecil dan bersifat positif karena jumlah tenaga kerja pada tahap konstruksi hanya berjumlah 12 orang dan kegiatan konstruksi hanya bersifat sementara.	1) Memberikan peluang kepada masyarakat yang ada di sekitar lokasi tapak kegiatan untuk membuka usaha-usaha yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. 2) Melakukan pembinaan terhadap pengembangan kegiatan unit usaha ekonomi rakyat setempat sebagai bentuk kepedulian manajemen terhadap lingkungan.	Lokasi pengelolaan dilakukan pada tapak kegiatan selama aktifitas konstruksi	Pengelolaan dilakukan selama tahap konstruksi berlangsung	Upaya pemantauan dengan melakukan observasi dan wawancara dengan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan	Pelaksanaan pemantauan dilakukan di lokasi tapak kegiatan	Pemantauan dilakukan 1 (satu) x 6 (enam) bulan selama tahap konstruksi	a. Pel aksana Dinas Kesehata n Kabupate n Pesisir Selatan selaku pemrakar sa. b. Pen gawas 1) Badan Lingkung an Hidup Kabupate n Pesisir Selatan

											2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan 3) Camat Airpura 4) Wali Nagari Muara Inderapura c. Pelaporan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
5.	Sikap dan Persepsi Masyarakat	Sumber dampak berasal dari : a. Mobilisasi peralatan dan material b. Pembangunan gedung puskesmas c. Rekrutmen	Dampak penting yang akan terjadi adalah munculnya persepsi positif akibat kegiatan konstruksi Puskesmas Airpura	Besaran dampak yang ditimbulkan adalah kecil dan bersifat positif karena kegiatan mobilisasi peralatan dan material serta pembangunan gedung Puskesmas akan mempengaruhi	1) Mengupayakan rekrutmen tenaga kerja dengan memprioritaskan tenaga kerja berasal dari masyarakat sekitar atau lokal sesuai dengan klasifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. 2) Melakukan penerimaan tenaga	Lokasi pengelolaan dilakukan pada tapak kegiatan selama aktifitas konstruksi	Pengelolaan dilakukan selama tahap konstruksi berlangsung	Upaya pemantauan dengan melakukan observasi dan wawancara dengan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan	Pelaksanaan pemantauan dilakukan di lokasi tapak kegiatan	Pemantauan dilakukan 1 (satu) x 6 (enam) bulan selama tahap konstruksi	a. Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selaku pemrakarsa. b.

		tenaga kerja untuk tahap operasi		ekonomi masyarakat di sekitar lokasi tapak kegiatan, selain itu dengan adanya kegiatan rekrutmen tenaga kerja untuk tahap operasi dapat mengurangi tingkat pengangguran khususnya di Kecamatan Airpura, pada umumnya di Kabupaten Pesisir Selatan.	kerja secara transparan dengan memasang pengumuman di Kantor Wali Nagari Muara Inderapura. 3) Memprioritaskan tenaga kerja berasal dari masyarakat sekitar atau lokal sesuai dengan klasifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan.						Pen gawas 1) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan 2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan 3) Camat Airpura 4) Wali Nagari Muara Inderapura c. Pelaporan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
G.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Sumber dampak berasal dari pembangunan gedung	Gangguan kesehatan dan keselamatan kerja muncul karena	Besaran dampak yang ditimbulkan tergolong kecil dan bersifat	1) Mewajibkan setiap tenaga kerja konstruksi memakai Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan	Pengelolaan dilakukan di lokasi tapak kegiatan	Pengelolaan dilakukan selama tahap konstruksi	Pengumpulan data dilakukan dengan observasi (pengamatan) lapangan dan	Pemantauan dilakukan di lokasi tapak kegiatan	Pemantauan dilakukan 1 (satu) x 6 (enam) bulan selama tahap	a. Pelaksana Dinas Kesehatan

	puskesmas	terjadinya kecelakaan kerja, serta penyakit akibat kerja terhadap tenaga kerja konstruksi	negatif karena jumlah tenaga kerja untuk tahap konstruksi hanya sebanyak 12 orang dan kegiatan konstruksi hanya bersifat sementara.	jenis resiko kerja. 2) Menyediakan kotak P3K. 3) Memasang rambu-rambu keselamatan di lokasi kegiatan konstruksi. 4) Memberikan penyuluhan kesehatan dan keselamatan kerja kepada tenaga kerja konstruksi. 5) Memberikan jaminan kesehatan kepada tenaga kerja berupa BPJS Ketenagakerjaan.			wawancara dengan tenaga kerja konstruksi di lokasi tapak kegiatan		konstruksi	n Kabupaten Pesisir Selatan selaku pemrakar sa. b. Pen gawas 1) Badan Lingkunga n Hidup Kabupate n Pesisir Selatan 2) Dinas Kesehata n Kabupate n Pesisir Selatan 3) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigr asi Kabupate n Pesisir Selatan 5) Me mberikan jaminan kesehata n kepada tenaga
--	-----------	---	---	--	--	--	---	--	------------	--

											Kabupaten Pesisir Selatan 2) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 3) Camat Airpura 4) Wali Nagari Muara Inderapur a. Pelaporan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
8.	Bahaya Kebakaran	Sumber dampak berasal dari pembangunan gedung puskesmas	Dampak yang akan terjadi adalah potensi kebakaran yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat dan merugikan pemrakarsa, tenaga kerja konstruksi,	Besaran dampak yang ditimbulkan tergolong sangat kecil dan bersifat negatif karena kegiatan pembangunan gedung Puskesmas yang menimbulkan bahaya kebakaran	1) Menyediakan APAR yang layak pakai. 2) Memasang APAR sesuai dengan Permenakertrans RI No 4/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan pada lokasi yang menjadi sumber dampak	Pengelolaan dilakukan pada lokasi sumber dampak bahaya kebakaran	Pengelolaan dilakukan selama kegiatan konstruksi	Melakukan observasi (pengamatan lapangan) dan wawancara dengan tenaga kerja konstruksi Puskesmas Airpura terhadap efektifitas pengelolaan yang dilakukan	Pemantauan dilakukan pada lokasi yang menjadi sumber dampak bahaya kebakaran	Pemantauan dilakukan 1 (satu) x 6 (enam) bulan selama tahap konstruksi	a. Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selaku pemrakarsa. b.

			dan masyarakat baik bersifat moril maupun material	hanya berasal dari kegiatan instalasi listrik.	bahaya kebakaran. (Lampiran 5). 3) Melakukan pengecekan secara berkala terhadap APAR kepada instansi berwenang. 4) Melakukan pemeriksaan instalasi listrik secara berkala kepada instansi berwenang. 5) Melakukan sosialisasi kepada semua tenaga kerja terhadap petunjuk penanggulangan kebakaran sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).						Pen gawas 1) Badan Lingkung an Hidup Kabupaten Pesisir Selatan 2) BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan c. Pel aporan Badan Lingkung an Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
9.	Gangguan Lalu Lintas	Sumber dampak berasal dari mobilitasi peralatan dan material	Terganggunanya jalur lalu lintas berupa munculnya kemacetan dan kecelakaan lalu lintas akibat mobilitasi material/bahan bangunan selama tahap	Besaran dampak yang ditimbulkan tergolong kecil dan bersifat negatif karena dilakukan pengaturan waktu kegiatan mobilisasi peralatan dan material sehingga tidak	1) Melakukan pengaturan waktu pengangkutan material diluar jam padat. 2) Membatasi tonase pengangkut material tidak melebihi tonase jalan. 3) Tidak melakukan penumpukan material di	Pengelolaan dilakukan di lokasi tapak kegiatan	Periode pengelolaan dilakukan selama kegiatan konstruksi	Upaya pemantauan dengan melakukan observasi dan wawancara dengan tenaga kerja konstruksi di lokasi tapak kegiatan serta masyarakat sekitar lokasi tapak kegiatan	Pemantauan dilakukan pada tapak kegiatan selama kegiatan konstruksi	Pemantauan dilakukan 1 (satu) x 6 (enam) bulan selama kegiatan konstruksi	a. Pel aksana Dinas Kesehata n Kabupaten Pesisir Selatan selaku pemrakarsa. b.

konstruksi yang diindikasikan dari penurunan kecepatan

menimbulkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

sepanjang bahu jalan.

Pen
gawas
1) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
2) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

c. Pel
aporan
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan

B TAHAP OPERASI

1.	Kualitas Udara dan Kebisingan	Sumber dampak berasal dari operasional genset	Dampak yang ditimbulkan yaitu meningkatnya kandungan parameter debu (TSP), gas (SO ₂ , NO ₂ , CO) dan peningkatan	Besaran dampak yang ditimbulkan tergolong sangat kecil dan bersifat negatif karena genset hanya dioperasikan pada saat	1) Menjaga kebersihan dapur dan ruang operasional genset agar kuantitas debu yang dihasilkan dapat diminimalisir sehingga kualitas udara ambient dapat terjaga dengan baik.	Lokasi pengelolaan dilakukan pada lokasi tapak kegiatan	Pengelolaan dilakukan selama tahap operasional berlangsung	Melakukan observasi lapangan dan melakukan wawancara dengan tenaga kerja operasional Puskesmas Airpura terhadap efektivitas pengelolaan yang dilakukan	Lokasi pemantauan dilakukan pada dapur dan ruang operasional genset serta Ruang Terbuka Hijau (RTH).	Pemantauan dilakukan 1 (satu) x 6 (enam) bulan selama kegiatan operasional Puskesmas Airpura	a. Pel aksana Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selaku
----	-------------------------------	---	---	--	---	---	--	--	--	--	--

			Kebisingan	terjadinya pemadaman listrik dari PLN.	2) Dapur dan ruang operasional genset dilengkapi dengan ventilasi yang bertujuan menjaga sirkulasi udara. 3) Perawatan berkala terhadap efisiensi mesin genset. 4) Menambahkan ruang terbuka hijau di lokasi tapak kegiatan, minimal 10% dari luas lahan dengan tumbuhan yang memiliki daya serap yang baik terhadap emisi. 5) Menambahkan tanaman di dalam pot (<i>in door</i> dan <i>out door</i>) untuk menambah nilai estetika dan menjaga kualitas udara baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan.						pemirak sa. b. Pen gawas 1) Badan Lingkunga n Hidup Kabupate n Pesisir Selatan 2) Dinas Kesehata n Kabupate n Pesisir Selatan c. Pel aporan Badan Lingkunga n Hidup Kabupate n Pesisir Selatan
2.	Kebauan	Sumber dampak berasal dari : a. Kegiatan medis .. Kegiatan non medis	Jenis dampak adalah adanya bau yang ditimbulkan dari kegiatan operasional Puskesmas Airpura sehingga dapat	Besaran dampak yang ditimbulkan tergolong kecil dan bersifat negatif karena dilakukan adanya bau yang ditimbulkan dari	1) Membuat pagar hidup atau ruang terbuka hijau di sekeliling lokasi pengelolaan limbah dengan jenis-jenis tanaman yang dapat menyerap gas-gas pencemar udara.	Lokasi pengelolaan dilakukan pada lokasi tapak kegiatan	Pengelolaan dilakukan selama tahap operasional berlangsung	Melakukan observasi lapangan dan melakukan wawancara dengan tenaga kerja operasional Puskesmas Airpura terhadap efektifitas pengelolaan yang dilakukan	Lokasi pemantauan dilakukan pada JPAL dan lokasi yang menimbulkan bau di lokasi tapak kegiatan	Pemantauan dilakukan 1 (satu) x 6 (enam) bulan selama kegiatan operasional Puskesmas Airpura	a. Pel aksana Dinas Kesehata n Kabupate n Pesisir Selatan selaku

			mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan	kegiatan medis dan non medis Puskesmas.	2) Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) berupa penutup mulut atau masker bagi tenaga kerja atau pengunjung puskesmas khususnya yang terkena dampak langsung.						pemrakar sa. b. Pen gawas 1) Badan Lingkunga n Hidup Kabupaten n Pesisir Selatan 2) Dinas Kesahota n Kabupaten n Pesisir Selatan c. Pel aporan Badan Lingkunga n Hidup Kabupaten n Pesisir Selatan
3.	Kualitas Air Tanah	Sumber dampak berasal dari : a. Kegiatan medis b. Kegiatan penunjang medis c. Kegiatan non medis	Terjadinya penurunan kualitas air tanah yang ditunjukkan dengan peningkatan nilai beberapa parameter kualitas air tanah yang melebihi baku	Besaran dampak yang ditimbulkan tergolong kecil dan bersifat negatif karena dalam perencanaan pembangunan Puskesmas Airpura, akan dibuatkan IPAL	1) Mengalirkan limbah cair domestik dari toilet ke <i>septic tank</i>. 2) Membuat IPAL yang kedap serta memiliki lubang pantau agar memudahkan untuk pengerukan sedimen yang ada di dalam bak limbah. 3) Membuat saluran	Pengelolaan dilakukan di lokasi tapak kegiatan	Pengelolaan dilakukan selama kegiatan operasional berlangsung	1) Pengambilan sampel air permukaan sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990	Pemantauan dilakukan pada : 1) Drainase yang ada di lokasi tapak kegiatan 2) IPAL 3) <i>Septick tank</i>	Pemantauan dilakukan 1 (satu) x 6 (enam) bulan selama kegiatan operasional Puskesmas Airpura	a. Pel aksana Dinas Kesehata n Kabupaten n Pesisir Selatan selaku pemrakar sa

			mutu	dan septic tank untuk meminimalisir terjadinya pencemaran terhadap air tanah.	pembuangan limbah cair yang tertutup, kedap air dan dapat mengalir dengan lancar sehingga tidak terjadi perembesan ke tanah. 4) Meletakkan sumbu bor sebagai sumber air bersih dengan jarak minimal 10 meter dari bak limbah dan septic tank. 5) Membuat bak kontrol untuk saluran limbah cair medis untuk mengantisipasi terjadinya penyumbatan.			tentang Syarat-syarat Kualitas Air Bersih dengan parameter Kekeruhan, Zat Padat Terlarut (TDS), Besi (Fe), Kesadahan (CaCO_3), Klorida (Cl), Mangan (Mn), Nitrat (NO_3)-N, pH, Sulfat (SO_4), dan Zat Organik (KmnO_4). 2) Pengamatan terhadap sistem penyaluran air limbah terhadap kelancaran dan kebocoran yang mungkin terjadi.			b. Pen gawas 1) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan 2) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan c. Pel aporan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
4.	Kualitas Air Permukaan	Sumber dampak berasal dari : a. Kegiatan medis b. Kegiatan penunjang medis c. Kegiatan non medis	Terjadinya penurunan kualitas air permukaan yang ditunjukkan dengan peningkatan nilai beberapa parameter kualitas air permukaan yang melebihi baku mutu	Besaran dampak yang ditimbulkan tergolong kecil dan bersifat negatif karena semua limbah cair yang berasal dari kegiatan operasional Puskesmas Airpura akan dialirkan ke	1) Membuat IPAL. 2) Membuat saluran pembuangan limbah cair yang tertutup, kedap air dan dapat mengalir dengan lancar sehingga tidak terjadi perembesan ke tanah. 3) Memisahkan saluran limbah cair dengan saluran air hujan. 4) Limbah cair yang	Pengelolaan dilakukan di area pengelolaan limbah cair dan instalasinya	Pengelolaan dilakukan selama tahap operasional berlangsung	Pemantauan dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dan memeriksakan kualitas air limbah yang dihasilkan pada lokasi tapak kegiatan	Lokasi pemantauan dilakukan pada outlet sistem IPAL	Pemantauan dilakukan 1 (satu) x 6 (enam) bulan selama kegiatan operasional Puskesmas Airpura.	a. Pel aksana Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selaku pemrakarsa. b. Pen

				tapak-kegiatan.	setempat sebagai bentuk kepedulian manajemen terhadap lingkungan.						Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan 2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan 3) Camat Airapura 4) Wali Nagari Muara Inderapura c. Pelaporan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
6.	Sikap dan Persepsi Masyarakat	Sumber dampak berasal dari : a. Kegiatan medis b. Kegiatan penunjang medis	Munculnya persepsi negatif yang bersumber dari limbah padat dan cair yang tidak terkelola.	Besaran dampak yang ditimbulkan tergoiing kecil dan bersifat negatif karena akan dikhawatirkan	1) Memberikan pelayanan yang ramah kepada masyarakat. 2) Pelaksanaan pelayanan pasien harus sesuai dengan SOP.	Pengelolaan dilakukan di lokasi tapak kegiatan	Pengelolaan dilakukan selama tahap operasional puskesmas	Pengumpulan data dilakukan dengan observasi (pengamatan lapangan), wawancara dengan masyarakat yang berada di sekitar	Lokasi pemantauan pada masyarakat di sekitar lokasi kegiatan dan tapak	Pemantauan dilakukan 1 (satu) x 6 (enam) bulan selama kegiatan operasional Puskesmas.	a. Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir

	c. Kegiatan non medis	Sedangkan dampak positif bagi masyarakat karena adanya fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Airpura	akan terjadinya pencemaran udara dan munculnya vektor penyakit.	3) Membuat saluran pembuangan limbah cair yang tertutup, kedap air dan dapat mengalir dengan lancar sehingga tidak terjadi perembesan ke tanah. 4) Memisahkan saluran limbah cair dengan saluran air hujan. 5) Limbah cair yang berasal dari kegiatan medis dan penunjang medis dialirkan ke IPAL. 6) Melakukan pengelolaan terhadap padat yang dihasilkan dari operasional Puskesmas dengan menyediakan tempat sampah terpilah dari limbah padat organik dan anorganik, serta limbah padat medis dan non medis. 7) Menyediakan kontainer tempat sampah terpilah. 8) Melakukan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan kerjasama dengan			lokasi tapak kegiatan, serta manajemen Puskesmas Airpura terhadap efektifitas pengelolaan	kegiatan operasional Puskesmas Airpura	Airpura	Selatan selaku pemrakarsa. b. Pen gawas 1) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan 2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan 3) Camat Airpura 4) Wali Nagari Muara Inderapur a c. Pel aporan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
--	-----------------------	---	---	--	--	--	---	--	---------	---

7.	Infeksi Nosokomial	Sumber dampak berasal dari : a. Kegiatan medis b. Kegiatan non medis	Dampak penting yang akan terjadi adalah muncul dan berkembangnya bakteri sebagai penular penyakit di lingkungan puskesmas	Besaran dampak yang ditimbulkan tergolong kecil dan bersifat negatif karena Puskesmas Airpura adalah tipe Puskesmas rawat inap 24 jam.	pihak ke 3 (tiga) yang memiliki <i>incenerator</i> . 1) Membatasi penularan organisme dari atau antar pasien dengan cara mencuci tangan, menggunakan sarung tangan, tindakan aseptik, isolasi pasien, sterilisasi, dan desinfeksi. 2) Mengontrol risiko penularan dari lingkungan 3) Melindungi pasien dengan penggunaan antibiotik profilaksis yang tepat, nutrisi yang cukup, dan vaksinasi. 4) Mengurangi risiko infeksi endogen dengan cara mengurangi prosedur invasif dan menggunakan antimikroba secara mikroba secara optimal. 5) Pengamatan infeksi, identifikasi, dan pengendalian wabah. 6) Pencegahan infeksi	Pengelolaan dilakukan di lokasi tapak kegiatan	Pengelolaan dilakukan selama kegiatan operasi berlangsung	Pengumpulan data dilakukan dengan observasi (pengamatan lapangan), wawancara dengan manajemen Puskesmas Airpura terhadap efektifitas pengelolaan	Lokasi pemantauan dilakukan di lokasi tapak kegiatan operasional Puskesmas Airpura	Pemantauan dilakukan 1 (satu) x 6 (enam) bulan selama kegiatan operasional Puskesmas Airpura	a. Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selaku pemrakarsa. b. Pengawas 1) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan 2) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan c. Pelaporan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir
----	--------------------	--	---	--	---	--	---	--	--	--	--

Date	Name	Address	City	State	Country	Occupation	Education	Religion	Marital Status	Children	Notes
1900	John Doe	123 Main St	New York	NY	USA	Teacher	High School	Protestant	Married	2	
1901	Jane Smith	456 Elm St	Chicago	IL	USA	Homemaker	High School	Catholic	Married	3	
1902	Robert Brown	789 Oak St	Los Angeles	CA	USA	Engineer	College	Methodist	Single	0	
1903	Mary White	101 Pine St	San Francisco	CA	USA	Nurse	College	Anglican	Married	1	
1904	William Black	202 Cedar St	Philadelphia	PA	USA	Lawyer	College	Jewish	Married	2	
1905	Elizabeth Green	303 Birch St	Boston	MA	USA	Writer	College	Protestant	Married	3	
1906	James Hall	404 Spruce St	Seattle	WA	USA	Merchant	High School	Buddhist	Single	0	
1907	Sarah King	505 Willow St	Portland	OR	USA	Teacher	College	Quaker	Married	2	
1908	Charles Lee	606 Ash St	San Diego	CA	USA	Engineer	College	Protestant	Married	1	
1909	Anna Miller	707 Hickory St	Denver	CO	USA	Homemaker	High School	Catholic	Married	3	
1910	George Wilson	808 Maple St	San Jose	CA	USA	Engineer	College	Protestant	Married	2	
1911	Frances Moore	909 Walnut St	San Antonio	TX	USA	Teacher	College	Methodist	Married	1	
1912	Henry Taylor	1010 Chestnut St	San Luis Obispo	CA	USA	Merchant	High School	Protestant	Married	2	
1913	Grace Adams	1011 Elm St	San Francisco	CA	USA	Homemaker	High School	Catholic	Married	3	
1914	Frank Baker	1012 Oak St	San Francisco	CA	USA	Engineer	College	Protestant	Married	2	
1915	Emily Clark	1013 Pine St	San Francisco	CA	USA	Teacher	College	Methodist	Married	1	
1916	Edward Davis	1014 Cedar St	San Francisco	CA	USA	Lawyer	College	Jewish	Married	2	
1917	Ida Evans	1015 Birch St	San Francisco	CA	USA	Homemaker	High School	Catholic	Married	3	
1918	Harold Fisher	1016 Spruce St	San Francisco	CA	USA	Engineer	College	Protestant	Married	2	
1919	Beatrice Gibson	1017 Willow St	San Francisco	CA	USA	Teacher	College	Methodist	Married	1	
1920	Alfred Hall	1018 Ash St	San Francisco	CA	USA	Engineer	College	Protestant	Married	2	
1921	Martha Hunt	1019 Hickory St	San Francisco	CA	USA	Homemaker	High School	Catholic	Married	3	
1922	Walter Ingram	1020 Maple St	San Francisco	CA	USA	Engineer	College	Protestant	Married	2	
1923	Josephine Jones	1021 Walnut St	San Francisco	CA	USA	Teacher	College	Methodist	Married	1	
1924	Samuel King	1022 Chestnut St	San Francisco	CA	USA	Merchant	High School	Protestant	Married	2	
1925	Lucy Lamb	1023 Elm St	San Francisco	CA	USA	Homemaker	High School	Catholic	Married	3	
1926	Frederick Lee	1024 Oak St	San Francisco	CA	USA	Engineer	College	Protestant	Married	2	
1927	Clara Lewis	1025 Pine St	San Francisco	CA	USA	Teacher	College	Methodist	Married	1	
1928	Clarence Miller	1026 Cedar St	San Francisco	CA	USA	Lawyer	College	Jewish	Married	2	
1929	Josephine Moore	1027 Birch St	San Francisco	CA	USA	Homemaker	High School	Catholic	Married	3	
1930	Harold Nelson	1028 Spruce St	San Francisco	CA	USA	Engineer	College	Protestant	Married	2	
1931	Beatrice Olsen	1029 Willow St	San Francisco	CA	USA	Teacher	College	Methodist	Married	1	
1932	Alfred Parker	1030 Ash St	San Francisco	CA	USA	Engineer	College	Protestant	Married	2	
1933	Martha Quinn	1031 Hickory St	San Francisco	CA	USA	Homemaker	High School	Catholic	Married	3	
1934	Walter Reed	1032 Maple St	San Francisco	CA	USA	Engineer	College	Protestant	Married	2	
1935	Josephine Scott	1033 Walnut St	San Francisco	CA	USA	Teacher	College	Methodist	Married	1	
1936	Samuel Shaw	1034 Chestnut St	San Francisco	CA	USA	Merchant	High School	Protestant	Married	2	
1937	Lucy Smith	1035 Elm St	San Francisco	CA	USA	Homemaker	High School	Catholic	Married	3	
1938	Frederick Taylor	1036 Oak St	San Francisco	CA	USA	Engineer	College	Protestant	Married	2	
1939	Clara Thomas	1037 Pine St	San Francisco	CA	USA	Teacher	College	Methodist	Married	1	
1940	Clarence Turner	1038 Cedar St	San Francisco	CA	USA	Lawyer	College	Jewish	Married	2	
1941	Josephine Vance	1039 Birch St	San Francisco	CA	USA	Homemaker	High School	Catholic	Married	3	
1942	Harold Webb	1040 Spruce St	San Francisco	CA	USA	Engineer	College	Protestant	Married	2	
1943	Beatrice White	1041 Willow St	San Francisco	CA	USA	Teacher	College	Methodist	Married	1	
1944	Alfred Wright	1042 Ash St	San Francisco	CA	USA	Engineer	College	Protestant	Married	2	
1945	Martha Young	1043 Hickory St	San Francisco	CA	USA	Homemaker	High School	Catholic	Married	3	
1946	Walter Ziegler	1044 Maple St	San Francisco	CA	USA	Engineer	College	Protestant	Married	2	
1947	Josephine Adams	1045 Walnut St	San Francisco	CA	USA	Teacher	College	Methodist	Married	1	
1948	Samuel Baker	1046 Chestnut St	San Francisco	CA	USA	Merchant	High School	Protestant	Married	2	
1949	Lucy Clark	1047 Elm St	San Francisco	CA	USA	Homemaker	High School	Catholic	Married	3	
1950	Frederick Evans	1048 Oak St	San Francisco	CA	USA	Engineer	College	Protestant	Married	2	
1951	Clara Fisher	1049 Pine St	San Francisco	CA	USA	Teacher	College	Methodist	Married	1	
1952	Clarence Gibson	1050 Cedar St	San Francisco	CA	USA	Lawyer	College	Jewish	Married	2	
1953	Josephine Hall	1051 Birch St	San Francisco	CA	USA	Homemaker	High School	Catholic	Married	3	
1954	Harold Hunt	1052 Spruce St	San Francisco	CA	USA	Engineer	College	Protestant	Married	2	
1955	Beatrice Ingram	1053 Willow St	San Francisco	CA	USA	Teacher	College	Methodist	Married	1	
1956	Alfred Jones	1054 Ash St	San Francisco	CA	USA	Engineer	College	Protestant	Married	2	
1957	Martha King	1055 Hickory St	San Francisco	CA	USA	Homemaker	High School	Catholic	Married	3	
1958	Walter Lamb	1056 Maple St	San Francisco	CA	USA	Engineer	College	Protestant	Married	2	
1959	Josephine Lee	1057 Walnut St	San Francisco	CA	USA	Teacher	College	Methodist	Married	1	
1960	Samuel Miller	1058 Chestnut St	San Francisco	CA	USA	Merchant	High School	Protestant	Married	2	
1961	Lucy Moore	1059 Elm St	San Francisco	CA	USA	Homemaker	High School	Catholic	Married	3	
1962	Frederick Nelson	1060 Oak St	San Francisco	CA	USA	Engineer	College	Protestant	Married	2	
1963	Clara Olsen	1061 Pine St	San Francisco	CA	USA	Teacher	College	Methodist	Married	1	
1964	Clarence Parker	1062 Cedar St	San Francisco	CA	USA	Lawyer	College	Jewish	Married	2	
1965	Josephine Quinn	1063 Birch St	San Francisco	CA	USA	Homemaker	High School	Catholic	Married	3	
1966	Harold Reed	1064 Spruce St	San Francisco	CA	USA	Engineer	College	Protestant	Married	2	
1967	Beatrice Shaw	1065 Willow St	San Francisco	CA	USA	Teacher	College	Methodist	Married	1	
1968	Alfred Scott	1066 Ash St	San Francisco	CA	USA	Engineer	College	Protestant	Married	2	
1969	Martha Smith	1067 Hickory St	San Francisco	CA	USA	Homemaker	High School	Catholic	Married	3	
1970	Walter Taylor	1068 Maple St	San Francisco	CA	USA	Engineer	College	Protestant	Married	2	
1971	Josephine Thomas	1069 Walnut St	San Francisco	CA	USA	Teacher	College	Methodist	Married	1	
1972	Samuel Turner	1070 Chestnut St	San Francisco	CA	USA	Merchant	High School	Protestant	Married	2	
1973	Lucy Vance	1071 Elm St	San Francisco	CA	USA	Homemaker	High School	Catholic	Married	3	
1974	Frederick Webb	1072 Oak St	San Francisco	CA	USA	Engineer	College	Protestant	Married	2	
1975	Clara White	1073 Pine St	San Francisco	CA	USA	Teacher	College	Methodist	Married	1	
1976	Clarence Wilson	1074 Cedar St	San Francisco	CA	USA	Lawyer	College	Jewish	Married	2	
1977	Josephine Wright	1075 Birch St	San Francisco	CA	USA	Homemaker	High School	Catholic	Married	3	
1978	Harold Young	1076 Spruce St	San Francisco	CA	USA	Engineer	College	Protestant	Married	2	
1979	Beatrice Ziegler	1077 Willow St	San Francisco	CA	USA	Teacher	College	Methodist	Married	1	
1980	Alfred Adams	1078 Ash St	San Francisco	CA	USA	Engineer	College	Protestant	Married	2	
1981	Martha Baker	1079 Hickory St	San Francisco	CA	USA	Homemaker	High School	Catholic	Married	3	
1982	Walter Clark	1080 Maple St	San Francisco	CA	USA	Engineer	College	Protestant	Married	2	
1983	Josephine Evans	1081 Walnut St	San Francisco	CA	USA	Teacher	College	Methodist	Married	1	
1984	Samuel Fisher	1082 Chestnut St	San Francisco	CA	USA	Merchant	High School	Protestant	Married	2	
1985	Lucy Gibson	1083 Elm St	San Francisco	CA	USA	Homemaker	High School	Catholic	Married	3	
1986	Frederick Hall	1084 Oak St	San Francisco	CA	USA	Engineer	College	Protestant	Married	2	
1987	Clara Hunt	1085 Pine St	San Francisco	CA	USA	Teacher	College	Methodist	Married	1	
1988	Clarence Ingram	1086 Cedar St	San Francisco	CA	USA	Lawyer	College	Jewish	Married	2	
1989	Josephine Jones	1087 Birch St	San Francisco	CA	USA	Homemaker	High School	Catholic	Married	3	
1990	Harold King	1088 Spruce St	San Francisco	CA	USA	Engineer	College	Protestant	Married	2	
1991	Beatrice Lamb	1089 Willow St	San Francisco	CA	USA	Teacher	College	Methodist	Married	1	
1992	Alfred Lee	1090 Ash St	San Francisco	CA	USA	Engineer	College	Protestant	Married	2	
1993	Martha Miller	1091 Hickory St	San Francisco	CA	USA	Homemaker	High School	Catholic	Married	3	
1994	Walter Moore	1092 Maple St	San Francisco	CA	USA	Engineer	College	Protestant	Married	2	
1995	Josephine Nelson	1093 Walnut St	San Francisco	CA	USA	Teacher	College	Methodist	Married	1	
1996	Samuel Olsen	1094 Chestnut St	San Francisco	CA	USA	Merchant	High School	Protestant	Married	2	
1997	Lucy Parker	1095 Elm St	San Francisco	CA	USA	Homemaker	High School	Catholic	Married	3	
1998	Frederick Quinn	1096 Oak St	San Francisco	CA	USA	Engineer	College	Protestant	Married	2	
1999	Clara Reed	1097 Pine St	San Francisco	CA	USA	Teacher	College	Methodist	Married	1	
2000	Clarence Shaw	1098 Cedar St	San Francisco	CA	USA	Lawyer	College	Jewish	Married	2	

											Selatan c. Pel aporan Badan Lingkung n Hidup Kabupate n Pesisir Selatan
9.	Timbunan Limbah Padat	Sumber dampak berasal dari : a. Kegiatan medis b. Kegiatan penunjang medis c. Kegiatan non medis	Jenis dampak yang ditimbulkan adalah terjadinya timbunan limbah padat di lokasi kegiatan Puskesmas Airpura terutama timbunan limbah padat sisa makanan dan minuman tenaga kerja dan pengunjung puskesmas	Dampak yang dihasilkan berskala sedang dan bersifat negatif karena Puskesmas Airpura adalah tipe Puskesmas rawat inap yang berlangsung selama 24 jam.	1) Menyediakan tempat sampah terpilah dari sampah organik dan anorganik di setiap ruangan Puskesmas Airpura serta lokasi yang beresiko menghasilkan timbunan limbah padat. 2) Menyediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS) terpilah dari sampah organik dan anorganik. 3) Melakukan koordinasi dengan lembaga pengelola sampah yang ada di Nagari Muara Inderapura.	Pengelolaan dilakukan di lokasi tapak kegiatan	Pengelolaan dilakukan selama kegiatan operasional Puskesmas Airpura	Melakukan observasi (pengamatan lapangan) di lokasi tapak kegiatan terhadap efektifitas pengelolaan yang dilakukan	Pemantauan dilakukan di lokasi tapak kegiatan	Pemantauan dilakukan 1 (satu) x 6 (enam) bulan selama kegiatan operasional Puskesmas Airpura	a. Pel aksana Dinas Kesehata n Kabupate n Pesisir Selatan selaku pemrakar sa. b. Pen gawas 1) Badan Lingkung n Hidup Kabupate n Pesisir Selatan 2) Dinas Kesehata n Kabupate n Pesisir Selatan 3) Camat

											Airpura 4) Wali Nagari Muara Inderapura c. Pelaporan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
10.	Timbulan Limbah B3	Sumber dampak berasal dari : a. Kegiatan medis b. Kegiatan penunjang medis	Jenis dampak yang ditimbulkan adalah terjadinya timbulan limbah B3 di lokasi kegiatan operasional Puskesmas Airpura	Dampak yang dihasilkan berskala sedang dan bersifat negatif karena Puskesmas Airpura adalah tipe Puskesmas rawat inap yang berlangsung selama 24 jam.	1) Mengidentifikasi dan memilah limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah yaitu, limbah infeksius dan limbah sitotoksik. 2) Menyediakan tempat sampah terpilah antara limbah medis klinis dan non klinis dan meletakkan pada tiap-tiap ruangan Puskesmas Airpura. 3) Meletakkan tempat sampah khusus limbah B3 pada lokasi yang aman dari jangkauan pengunjung puskesmas dan hewan-hewan	Pengelolaan dilakukan di lokasi tapak kegiatan	Pengelolaan dilakukan selama kegiatan operasional Puskesmas Airpura	Melakukan observasi (pengamatan lapangan) di lokasi tapak kegiatan terhadap efektifitas pengelolaan yang dilakukan	Pemantauan dilakukan di lokasi tapak kegiatan	Pemantauan dilakukan 1 (satu) x 5 (enam) bulan selama kegiatan operasional Puskesmas Airpura	a. Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan pemrakarsa. b. Pengawas 1) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan 2) Dinas Kesehatan

					untuk menghindari tercampurnya dengan limbah lain yang tidak termasuk kedalam limbah B3. 4) Menyediakan TPS limbah B3 sebelum diberikan kepada pihak ke tiga. 5) Melakukan kerjasama dengan pihak ke tiga yang memiliki <i>incenerator</i> dan memiliki izin pengelolaan limbah B3 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.						n Kabupate n Pesisir Selatan c. Pel aporan Badan Lingkunga n Hidup Kabupate n Pesisir Selatan
11.	Bahaya Kebakaran	Sumber dampak berasal dari : a. Kegiatan penunjang medis b. Kegiatan non medis c. Operasional genset	Dampak yang akan terjadi adalah potensi kebakaran yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat dan merugikan pemrakarsa, tenaga kerja, dan masyarakat	Besaran dampak tergolong kecil dan bersifat negatif karena pihak pemrakarsa akan melakukan pengadaan alat pemadam kebakaran berupa racun api di lokasi	1) Menyediakan APAR yang layak pakai. 2) Memasang APAR sesuai dengan Permenakertrans RI No 4/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan. (Lampiran 5) 3) Melakukan pengecekan secara	Pengelolaan dilakukan pada lokasi sumber dampak bahaya kebakaran	Pengelolaan dilakukan selama kegiatan operasional Puskesmas Airpura	Melakukan observasi (pengamatan lapangan) dan wawancara dengan tenaga kerja Puskesmas Airpura terhadap efektivitas pengelolaan	Pemantauan dilakukan pada lokasi yang menjadi sumber dampak bahaya kebakaran	Pemantauan dilakukan 1 (satu) x 6 (enam) bulan selama kegiatan operasional Puskesmas Airpura	a. Pel aksana Dinas Kesehata n Kabupate n Pesisir Selatan selaku pemrakarsa. b. Pen

			baik bersifat moril maupun material	yang menimbulkan resiko bahaya kebakaran.	berkala terhadap APAR kepada instansi berwenang. 4) Melakukan pemeriksaan instalasi listrik secara berkala kepada instansi berwenang. 5) Pengoperasian genset yang dilakukan oleh teknisi yang berpengalaman. 6) Melakukan sosialisasi kepada semua tenaga kerja terhadap petunjuk penanggulangan kebakaran sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).						gawas 1) BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang 2) Badan Lingkunga n Hidup Kabupate n Pesisir Selatan c. Pel aporan Badan Lingkunga n Hidup Kabupate n Pesisir Selatan.
12.	Gangguan Lalu Lintas	Sumber dampak berasal dari : a. Kegiatan medis b. Kegiatan penunjang medis c. Kegiatan non medis	Terganggunya jalur lalu lintas berupa munculnya kemacetan dan kecelakaan lalu lintas akibat mobilitasi kendaraan tenaga kerja puskesmas dan pengunjung	Besaran dampak yang ditimbulkan tergolong kecil dan bersifat negatif karena disediakan area parkir di lokasi kegiatan seluas 2.550 m ² dengan pintu masuk dan pintu keluar secara terpisah.	Menyediakan area parkir yang cukup untuk karyawan dan pengunjung puskesmas	Lokasi pengelolaan dilakukan pada tapak kegiatan	Periode pengelolaan dilakukan selama kegiatan operasional Puskesmas Airpura	Upaya pemantauan dengan melakukan observasi dan wawancara dengan masyarakat di lokasi tapak kegiatan terhadap efektifitas pengelolaan	Pemantauan dilakukan pada tapak kegiatan selama kegiatan operasional Puskesmas Airpura	Pemantauan dilakukan 1 (satu) x 6 (enam) bulan selama kegiatan operasional Puskesmas Airpura	a. Pel aksana Dinas Kesehata n Kabupate n Pesisir Selatan selaku pemrakar sa b. Pen gawas

[illegible]

A.n BUPATI PESIRIR SELATAN
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN PESIRIR SELATAN



KATA PENGANTAR

Dokumen UKL-UPL

Puskesmas Airpura

Pembangunan Puskesmas merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 28 Ayat (1) dan UU No. 23 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dikarenakan di Kecamatan Airpura belum memiliki Puskesmas, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan merencanakan pembangunan Puskesmas di Kecamatan Airpura yang berlokasi di Kampung Air Mati, Nagari Muara Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas bangunan $\pm 2.991 \text{ m}^2$ di atas lahan $\pm 10.000 \text{ m}^2$.

Setiap kegiatan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup baik lingkungan fisik, kimia, biologi, sosial ekonomi budaya, dan kesehatan masyarakat. Dampak tersebut dapat bersifat positif yang menguntungkan masyarakat tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif yang menurunkan kualitas lingkungan hidup.

Dalam penyusunan formulir ini, kami telah berusaha untuk menyampaikan informasi dan data-data berkaitan dengan kegiatan klinik serta upaya-upaya yang dilakukan untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya penyusunan UKL-UPL ini, kami mengucapkan terimakasih.

Painan, September 2016
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan

dr. H. Syahrizal Antoni, SY. MPH
NIP. 19701104 200012 1001

											berupa BPJS Kesehatan dan Kecelakaan Kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan
											c. Pelaporan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
7.	Timbulan Limbah Padat	Sumber dampak berasal dari pembangunan gedung puskesmas	Dampak penting yang akan terjadi adalah peningkatan timbulan limbah padat di lokasi tapak kegiatan	Besaran dampak yang ditimbulkan adalah kecil dan bersifat negatif karena kegiatan konstruksi hanya sementara.	1) Menyediakan tempat sampah terpilah dari sampah organik dan anorganik di lokasi kegiatan konstruksi. 2) Melakukan pengelolaan terhadap limbah padat berupa sisa-sisa material konstruksi. 3) Melakukan koordinasi dengan lembaga pengelola sampah yang ada di Nagari Muara Inderapura.	Pengelolaan dilakukan di lokasi tapak kegiatan	Pengelolaan dilakukan selama tahap konstruksi	Pengumpulan data dilakukan dengan observasi (pengamatan) lapangan dan wawancara dengan tenaga kerja konstruksi di lokasi tapak kegiatan	Pemantauan dilakukan di lokasi tapak kegiatan	Pemantauan dilakukan 1 (satu) x 6 (enam) bulan selama tahap konstruksi	a. Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selaku pemrakarsa. b. Pengawas 1) Badan Lingkungan Hidup